



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 87 Sidoarjo (61253)

Telp. 031-8671763, Fax. 031-8674342

Website : www.dilmilti3-surabaya.go.id – Email : dilmiltisurabaya@gmail.com

Sidoarjo, 30 Juli 2025

Kepada

Yth Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Jl. Ketintang Madya VI No.2 003, RT.003/RW.08, Karah,
Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur
60232

SURAT PENGANTAR

Nomor : 218 /SEK.PMT.W3-Mil/KU 1.1.3/VII/2025

NO.	ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengiriman Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Satker Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (663301) melalui aplikasi Monsakti.	1 (satu) bendel	Demikian mohon dimaklumi.



sekretaris,

Djati Santoso

Kolonel Pom NRP 520873

Tembusan: (Tpl)

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
3. Kadilmilti III Surabaya (Sbg Laporan)
4. Kepala KPPN Surabaya II
5. Arsip



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
(663301)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2025

Data Per-30 Juni 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 30 Juni 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 23 Juli 2025

Sekretaris

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya,



DJATI SANTOSO, S.H., M.H
KOLONEL POM NRP 520873

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xi
NERACA	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4. Basis Akuntansi	5
A.5. Dasar Pengukuran	6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
B.1 Pendapatan	13
B.2 Belanja	14
B.3 Belanja Pegawai	15
B.4 Belanja Barang	16
B.5 Belanja Modal	17
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18
B.5.3 Belanja Modal Lainnya	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	20

C.1. Aset Lancar	20
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	20
C.1.4. Piutang Bukan Pajak	21
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	22
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	23
C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	23
C.1.8. Persediaan.....	24
C.2. Aset Tetap	24
C.2.1. Tanah	24
C.2.2. Peralatan dan Mesin	27
C.2.3. Gedung dan Bangunan	27
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	28
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	29
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
C.3. Aset Lainnya	30
C.3.1. Aset Tak Berwujud	30
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	31
C.3.3. Aset Lain–Lain	31
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	33
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga.....	33
C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan	34
C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan	34
C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka	34
C.4.5. Uang Muka dari KPPN	34
C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya	35

C.5 Ekuitas	35
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	36
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
D.2 Beban Pegawai.....	36
D.3 Beban Persediaan	37
D.4 Beban Barang dan Jasa	38
D.5 Beban Pemeliharaan	39
D.6 Beban Perjalanan Dinas	39
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	40
D.9 Kegiatan Non Operasional	41
D.10 Pos Luar Biasa	42
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	43
E.1 Ekuitas Awal	43
E.2 Surplus/Defisit LO.....	43
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	43
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	43
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	43
E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi	43
E.4.4 Selisih Revaluasi Aset	44
E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	44
E.4.6 Koreksi Lain-lain	44
E.5 Transaksi Antar Entitas	44
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	45
E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk	45
E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	46
E.6 Ekuitas Akhir.....	46
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	47

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	47
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	47
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	13
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2023	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2023	15
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 2023	16
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2023	17
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	18
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 .	18
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	19
Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	20
Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	20
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	21
Tabel 14. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	21
Tabel 15. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025	21
Tabel 16. Mutasi Piutang Bukan Pajak	22
Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025	22
Tabel 18. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	23
Tabel 19. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	23
Tabel 20. Rincian Persediaan	24
Tabel 21. Mutasi Transaksi Tanah	25
Tabel 22. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025	26
Tabel 23. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin	27
Tabel 24. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan	27
Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya	28
Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	29
Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud	30
Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain	32
Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	33
Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	34

Tabel 33. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 36

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 36

Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 37

Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2024 dan 2023 38

Tabel 37. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 39

Tabel 38. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024..... 39

Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 40

Tabel 40. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 41

Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 41

Tabel 42. Rincian Koreksi Lainnya 44

Tabel 43. Rincian Transaksi Antar Entitas 45

Tabel 44. Rincian Transfer Keluar 45

Tabel 45. Rincian Transfer Masuk 45

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 87 Sidoarjo – Jawa Timur 61253

Telp. 031-8661763 Fax. 031-8664342 e-mail: dilmiltisurabaya@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 23 Juli 2025

Sekretaris

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya,



FRANK SANTOSO, S.H., M.H
KOLONEL POM NRP 520873

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp 86,682,160,00 atau mencapai 18.51% dari alokasi anggaran sebesar Rp 468,405,000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5,000,000,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 5,000,000,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 82,869,160,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (82,869,160,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp 82,869,160,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar (Rp 3,813,000,00) dikurangi defisit-LO sebesar (Rp 82,869,160,00), ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp 3,813,000,00, kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 82,869,160,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp0,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan		-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	B.4	468,405,000.00	86,682,160.00	19	409,430,000.00	193,686,560.00	47
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja		468,405,000.00	86,682,160.00	19	409,430,000.00	193,686,560.00	47

NERACA

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NERACA

PER 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 Juni 2025	30 Juni 2024
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	5,000,000.00	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	0.00	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.3	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.4	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.5	0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.6	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C. 1.7	0.00	0.00
Persediaan	C. 1.8	0.00	0.00
Jumlah Aset Lancar		5,000,000.00	0.00
Aset Tetap	C. 2		
Tanah	C. 2.1	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	0.00	0.00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.4	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.5	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.6	0.00	0.00
Jumlah Aset Tetap		0.00	0.00
ASET LAINNYA	C. 3		
Aset Tak Berwujud	C. 3.1	0.00	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 3.2	0.00	0.00
Aset Lain-Lain	C. 3.3	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 3.4	0.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya		0.00	0.00
JUMLAH ASET		5,000,000.00	0.00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	0.00	3,813,000.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	0.00	0.00
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C. 4.3	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 4.4	0.00	0.00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.5	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 4.6	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0.00	3,813,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN		0.00	3,813,000.00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	0.00	(3,813,000.00)
JUMLAH EKUITAS		0.00	(3,813,000.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0.00	0.00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		0.00	0.00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	0.00	0.00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	7,500,200.00	11,266,100.00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	21,250,500.00	20,671,900.00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	0.00	0.00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	54,118,460.00	157,829,110.00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	0.00	0.00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN		82,869,160.00	189,767,110.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(82,869,160.00)	(189,767,110.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	0.00	0.00
POS LUAR BIASA	D. 10	0.00	0.00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(82,869,160.00)	(189,767,110.00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 juni 2025	30 Juni 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	(3,813,000.00)	(3,919,450.00)
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(82,869,160.00)	(189,767,110.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0.00	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0.00	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0.00	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0.00	0.00
Lain-lain	E. 4.6	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	86,682,160.00	193,686,560.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		3,813,000.00	3,919,450.00
EKUITAS AKHIR	E. 6	0.00	0.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Dasar Hukum***Dasar**Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 30 Juni 2024 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akreal dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Militer Tinggi
III Surabaya*

Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025-2029 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA YANG AGUNG”.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mengelola *man, money*, dan *material* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Badan Peradilan di Bawahnya mempunyai peran yang sangat penting mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempunyai peranan utama dalam membangun opini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya khususnya dibidang pelaporan keuangan dan aset;
3. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disamping mempunyai fungsi melakukan koordinasi, pembinaan dan juga pelaksanaan perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan peradilan militer, serta kehumasan keprotokolan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi:

1. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana dan lain-lain;
2. Adanya Kebijakan Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran, dan sarana prasarana Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
3. Adanya dukungan dari berbagai pihak (termasuk luar negeri/lembaga donor).

Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:

Untuk mencapai visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan kelembagaan/organisasi dan tata laksana peradilan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai;
5. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan;
6. Meningkatkan penatausahaan aset negara;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.

Tujuan

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah:

1. Terwujudnya dukungan *man, money, dan material* atas tugas fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
2. Terlaksananya layanan rumah tangga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai dengan indikator tujuan.

Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan, dan BMN yang akuntabel;
3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
4. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja

yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA*
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
 - Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	50%

	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku	50

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Semester I Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp 468,405,000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dengan tidak menambah atau mengurangi Pagu Anggarannya. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

**Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025**

(dalam Rupiah)

Uraian	PER 30 JUNI 2024	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan	0.00	0.00
Belanja		
Belanja Pegawai	0.00	0.00
Belanja Barang	468,405,000.00	468,405,000.00
Belanja Modal	0.00	0.00
Jumlah Belanja	468,405,000.00	468,405,000.00

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp0,00.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 30 JUNI 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0.00	0.00	#DIV/0!
4259	Pendapatan Lain-Lain	0.00	0.00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Bruto		-	-	#DIV/0!
Pengembalian		0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Netto		-	-	#DIV/0!

B.2 Belanja

Realisasi Realisasi Belanja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada periode 30 Juni 2025 adalah
Belanja Rp sebesar Rp 86,682,160,00 atau 18.51% dari anggaran belanja sebesar Rp468,405,000,00.
86,682,160,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0.00	0.00	#DIV/0!
52	Belanja Barang	468,405,000.00	86,682,160.00	18.51
53	Belanja Modal	0.00	0.00	#DIV/0!
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		468,405,000.00	86,682,160.00	18.51
Pengembalian		0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		468,405,000.00	86,682,160.00	18.51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 107,004,000,00 atau sebesar 55.25% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Barang
Dilakukannya penghematan dalam belanja dikarenakan pagu anggaran dalam Semester I Tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun 2024 dan ada anggaran perjalanan dinas yang masih di blokir (dibintang).

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		30 juni 2025	30 juni 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
52	Belanja Barang	86,682,160.00	193,686,560.00	(107,004,400.00)	(55.25)
53	Belanja Modal	0.00	\	#VALUE!	#VALUE!
Jumlah Belanja Transaksi Kas		86,682,160.00	193,686,560.00	(107,004,400.00)	(55.25)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak terdapat realisasi Belanja Pegawai. Adapun rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunj. Anak PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunj. Struktural PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunj. PPh PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunj. Beras PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Umum PNS	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Gaji Pokok PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Beras PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	#DIV/0!

B.4 Belanja Barang

Belanja Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing
Barang Rp sebesar Rp 86,682,160,00 dan Rp 193,686,560,00. Realisasi Belanja Barang mengalami
 86,682,160,00 penurunan sebesar (Rp 107,004,000,00) atau 55.25% dibandingkan dengan realisasi
 Belanja Barang 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	21,053,500.00	19,036,350.00	2,017,150.00	10.60
Belanja Barang Non Operasional	3,810,000.00	5,555,000.00	(1,745,000.00)	(31.41)
Belanja Barang Persediaan	7,500,200.00	11,266,100.00	(3,765,900.00)	(33.43)
Belanja Jasa	200,000.00	0.00	200,000.00	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	56,570,000.00	156,929,110.00	(100,359,110.00)	(63.95)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0.00	900,000.00	(900,000.00)	(100.00)
Realisasi Belanja Bruto	89,133,700.00	193,686,560.00	(104,552,860.00)	(53.98)
Pengembalian	-	0.00	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	89,133,700.00	193,686,560.00	(104,552,860.00)	(53.98)

Penurunan Realisasi Belanja Barang disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Dilakukannya penghematan dalam belanja dikarenakan pagu anggaran dalam Semester I Tahun 2025 ada sebagian yang masih do blokir pusat dibandingkan dengan tahun 2024;

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025 dan Tahun 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Rp0,00 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 (dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Rp0,00 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 (dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp 5,000,000,00 Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 5,000,000,00 dan Rp0,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 5,000,000,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5,000,000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 10. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Saldo UP	5,000,000.00	0.00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0.00	0.00
3	Saldo TUP	0.00	0.00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0.00	0.00
Jumlah		5,000,000.00	0.00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 11. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1		0.00	0.00
2		0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

(Prepaid)
Rp0,00

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada 30 Juni 2025 merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa berupa sewa web hosting oleh pemerintah.

Tabel 12. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1		0.00	0.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
JUMLAH		0	0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 13. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1		0.00	0.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4		0.00	0.00
JUMLAH		0.00	0.00

Tabel 14. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Piutang Bukan Pajak	Bukti Setor		
			Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak					
1		0.00	-	-	-
Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak		0.00			
Piutang Lainnya					
1		0.00	-	-	-
Jumlah Piutang Lainnya		0.00			
Jumlah		-			

Mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Mutasi Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi Tambah:	
Piutang Lainnya	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Piutang PNPB	-
Piutang Lainnya	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat penjelasan mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada Semester I Tahun 2025.

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak (Rp0,00)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar (Rp0,00) dan sebesar (Rp0,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 16. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025.

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1			-	0%	0.00
2			-	0%	0.00
Total					0.00

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00. Bagian Lancar pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 17. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar
1	-	-	0,00

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Rp0,00) Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar (Rp0,00) dan sebesar (Rp0,00). Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada periode Semester I Tahun 2025. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 18. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	-	-	-	-	-

C.1.8. Persediaan

Persediaan
Rp0,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	0.00	0.00	0.00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp0,00

Nilai Aset Tetap Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.2.1. Tanah

Tanah Rp0,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Semester I Tahun 2025.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 30 Juni 2024	0.00
Mutasi tambah:	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 30 Juni 2025	0.00

Tabel 21. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
						-
						-
						-
Jumlah Halaman I					-	-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp0,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	0.00
Transfer Masuk	0.00
Hibah Masuk	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
Transfer Keluar	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
Nilai Buku	0.00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	0.00
Pembelian	0.00
Reklasifikasi Masuk	0.00
Transfer Masuk	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
Transfer Keluar	0.00
Reklasifikasi Keluar	0.00
Koreksi Pencatatan	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
Nilai Buku	0.00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.
Lainnya Rp0,00 Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode . Semester I Tahun 2025.

Tabel 24. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
-	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
-	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
Nilai Buku	0.00

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan Gedung Bangunan pada Satuan Kerja di bawah lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 25. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo per 30 Juni 2024	0.00
Perolehan KDP	0.00
Pengembangan KDP	0.00
Perolehan Lainnya KDP	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
-	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 30 Juni 2025	0.00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp0,00) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing (Rp0,00) dan (Rp0,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 26. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
2	Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
3	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada periode Semester I Tahun 2025.

Tabel 27. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	0.00
-	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
-	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	0.00
Akumulasi Amortisasi	0.00
Nilai Buku	0.00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0,00

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kas yang dibatasi penggunaannya pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset lainnya. Pencatatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya sampai dengan Tahun Anggaran berakhir menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran).

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya nihil pada . Semester I Tahun 2025 karena telah terbit SP2D Pembayaran serta dilakukan jurnal balik pada Modul Akuntansi dan Pelaporan.

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Militer Tinggi III Surabayaserta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode Semester I Tahun 2025.

Tabel 28. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
-	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
-	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
Nilai Buku	0.00

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp0,00) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing (Rp0,00) dan (Rp0,00). Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 29. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1		0.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabayamerupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 3,813,000,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 30. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai YMHD	0.00	
2	Belanja Barang YMHD	0.00	
3	Pengeluaran Transitio YMHD	0.00	
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0.00	
Jumlah		0.00	

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0,00
Yang Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan Rp0,00
yang Hibah yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Belum Disahkan Hibah yang Belum Disahkan adalah hibah atau pemberian tanpa klausul syarat yang mengikat dari pihak ketiga kepada Pemerintah namun belum terbit pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00
Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Tabel 31. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
Jumlah		0.00

C.4.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp 5,000,000,00
Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5,000,000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rp0,00 Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara hingga tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Rp0,00 Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp 3,813,000,00). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp0,00 Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 32. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	#DIV/0!
	Total	0.00	0.00	#DIV/0!

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0,00 Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 33. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
4	Beban Tunj. Anak PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
7	Beban Tunj. PPh PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
8	Beban Tunj. Beras PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
9	Beban Uang Makan PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
10	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	0.00	0.00	#DIV/0!
11	Beban Tunjangan Umum PNS	0.00	0.00	#DIV/0!
12	Bebas Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0.00	0.00	100.00
13	Beban Gaji Pokok PPPK	0.00	0.00	#DIV/0!
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	0.00	0.00	#DIV/0!
15	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0.00	0.00	#DIV/0!
16	Beban Tunjangan Anak PPPK	0.00	0.00	#DIV/0!
17	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0.00	0.00	#DIV/0!
18	Beban Tunjangan Beras PPPK	0.00	0.00	#DIV/0!
19	Beban Uang Makan PPPK	0.00	0.00	100.00
20	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0.00	0.00	#DIV/0!
21	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0.00	0.00	100.00
Total		0.00	0.00	#DIV/0!

D.3 Beban Persediaan

Beban

Persediaan Rp

7,500,200,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 7,500,200,00 dan Rp 11,266,100,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode . Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 33.43%.

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	7,500,200.00	11,266,100.00	(33.43)
Total		7,500,200.00	11,266,100.00	(33.43)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 82,869,160,00 Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 82,869,160,00 dan Rp 189,767,110,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 35. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2024 dan 2023*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,240,500.00	15,116,900.00	14.05
2	Beban Bahan	3,810,000.00	5,555,000.00	(31.41)
3	Beban Persediaan Barang Konsumsi	7,500,200.00	11,266,100.00	(33.43)
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa	54,118,460.00	156,929,110.00	(65.51)
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	900,000.00	(100.00)
6	Beban Jasa Lainnya	200,000.00	0.00	0.00
Total		82,869,160.00	189,767,110.00	(56.33)

Penurunan beban barang dan jasa pada periode pelaporan Semester I Tahun 2025 sebesar 56.33% disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Penurunan Total Pagu DIPA di 2025 lebih besar dibandingkan dengan Semester I Tahun 2025, dimana secara keseluruhan total realisasi mengalami penurunan akan tetapi secara prosentase penyerapan anggaran;
2. Dilakukannya penghematan dalam belanja dikarenakan pagu anggaran dalam Semester I Tahun 2025 menurun dibandingkan dengan 30 Juni 2024;

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp0,00 Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	#DIV/0!
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0.00	0.00	#DIV/0!
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	#DIV/0!
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0.00	0.00	#DIV/0!
Total		0.00	0.00	#DIV/0!

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp 54,118,460,00 Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 54,118,460,00 dan Rp 157,829,110,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	54,118,460.00	156,929,110.00	(65.51)
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0.00	900,000.00	(100.00)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0.00	0.00	0.00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0.00	0.00	0.00
6	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0.00	0.00	0.00
Total		54,118,460.00	157,829,110.00	(65.71)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Semester I Tahun 2025 sebesar 65.71%. Hal tersebut disebabkan menurunnya frekuensi kegiatan perjalanan

dinas pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena mahal nya biaya perjalanan dinas sedangkan pagu anggaran tidak ada peningkatan juga ada nya diblokir nya anggaran untuk perjalanan dinas sebagian.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,00 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Semester I Tahun 2025 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	#DIV/0!
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	#DIV/0!
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi	0.00	0.00	#DIV/0!
4	Beban Penyusutan Jaringan	0.00	0.00	#DIV/0!
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	100.00
Jumlah Penyusutan		0.00	0.00	#DIV/0!
1	Beban Amortisasi Software	0.00	0.00	#DIV/0!
2	Beban Amortisasi Lisensi	0.00	0.00	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi		0.00	0.00	#DIV/0!
1	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0.00	0.00	#DIV/0!
Total		0.00	0.00	#DIV/0!

Tidak terdapat data Beban penyusutan dan amortisasi pada periode pelaporan Semester I Tahun 2025.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih (Rp0,00) Tertagih untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp0,00) dan Rp0,00.

Tabel 39. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0.00	0.00	0.00
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

Tidak terdapat data Beban penyisihan piutang tak tertagih pada periode pelaporan Semester I Tahun 2025.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rp0,00 Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 40. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pelepasan Aset	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00
1	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	0.00	0.00
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0.00	0.00	0.00
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0.00	0.00	0.00

Tidak terdapat penurunan defisit dari kegiatan non operasional pada periode Semester I Tahun 2025 yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya seperti pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja barang yang berasal dari tahun anggaran yang lalu maupun pendapatan setoran TP/TGR. Selain itu, penurunan pada Pelepasan Aset Non Lancar dikarenakan belum terdapat penghapusan aset pada Satuan Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabayasampai dengan periode pelaporan Semester I Tahun 2025.

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal (Rp 3,813,000,00) Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp 3,813,000,00) dan (Rp 3,919,450,00).

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO (Rp 82,869,160,00) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah defisit sebesar (Rp 82,869,160,00) dan (Rp 189,767,110,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0,00 Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0,00 Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang timbul akibat adanya pencatatan reklasifikasi Aset Tetap/Lainnya karena kesalahan pemilihan kodefikasi Aset Tetap/Lainnya

pada masa lampau. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Rp0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0,00 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain (Rp0,00) Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp0,00) dan Rp0,00.

Rincian koreksi lainnya pada periode pelaporan . Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Koreksi Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai Piutang Audited 2024	Nilai Piutang Seharusnya	Koreksi Lainnya
1		0.00	0.00	-
2		0.00	0.00	-
Total		-	-	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp 86,682,160,00 Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 86,682,160,00 dan Rp 193,686,560,00. Transaksi antar Entitas adalah 86,682,160,00

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 42. Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	0.00
Diterima dari Entitas Lain	0.00
Transfer Keluar	0.00
Transfer Masuk	0.00
Pengesahan Hibah Langsung	0.00
JUMLAH	0.00

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar (Rp0,00) sedangkan DKEL sebesar Rp0,00.

E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, Transfer Keluar sebesar (Rp0,00) sedangkan Transfer Masuk sebesar Rp0,00.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar (Rp0,00) terdiri dari:

Tabel 43. Rincian Transfer Keluar

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	Transfer Keluar
1	Peralatan dan Mesin	0.00
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
3	Gedung dan Bangunan	0.00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
Jumlah		0.00

Tidak terdapat data Transfer Keluar pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya .

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

Tabel 44. Rincian Transfer Masuk

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	Transfer Masuk
1	Peralatan dan Mesin	0.00
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
3	Gedung dan Bangunan	0.00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
Jumlah		0.00

Tidak terdapat data Transfer Masuk pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp0,00.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp0,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Selama periode Tahun Anggaran 2024 dan Semester I tahun 2025, di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak dilaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak dapat diungkapkan mengenai temuan dan tindak lanjut temuan BPK.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk periode Semester I Tahun 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1) Terdapat rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Bendahara Pengeluaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Semester I Tahun 2025, Bendahara Pengeluaran di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berfungsi sebagai koordinator yaitu menerima dan mendistribusikan uang persediaan (UP).

Dalam mengelola UP yang diberikan, Bendahara Pengeluaran di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan rekening giro. Adapun rekening virtual yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah BPG 135 PM TINGGI III SBY dengan nomor rekening 651556633011000 dengan saldo terakhir Rp0,00.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Sekretaris telah mengajukan permohonan izin pembukaan rekening ke KPPN Surabaya II melalui Surat Nomor: W3.Mil/54/KU.01/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, dan mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPN Surabaya II sesuai Surat Nomor: S-1875/WPB.12/KP.06/2021/135 tanggal 8 Juli 2021.

2) Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor : SP DIPA-005.05.2.663301/2025 tanggal 02 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp 468.405.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

PROGRAM	AKUN	DIPA AWAL (Rp)
1058.AEA.001	524111	75.000.000,00
1058.AEA.002	524111	25.000.000,00
1058.BCA.U02	521211	16.200.000,00
	521811	21.600.000,00
	521211	16.200.000,00
	521114	18.000.000,00
	521114	3.600.000,00
1058.BCA.U03	521211	4.200.000,00
	521811	4.375.000,00
	521114	350.000,00
	521211	14.700.000,00
	524113	21.140.000,00
	521211	1.750.000,00
	521114	3.640.000,00
1058.QCA.001	522191	1.000.000,00
	524111	241.650.000,00
JUMLAH PAGU		468.405.000,00

b. Revisi DIPA ke-1 tanggal 21 Februari 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.AEA.001	524111	75.000.000,00	75.000.000,00
1058.AEA.002	524111	25.000.000,00	25.000.000,00
1058.BCA.U02	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521811	21.600.000,00	21.600.000,00
	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00
	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
1058.BCA.U03	521211	4.200.000,00	4.200.000,00
	521811	4.375.000,00	4.375.000,00

	521114	350.000,00	350.000,00
	521211	14.700.000,00	14.700.000,00
	524113	21.140.000,00	21.140.000,00
	521211	1.750.000,00	1.750.000,00
	521114	3.640.000,00	3.640.000,00
1058.QCA.001	522191	1.000.000,00	1.000.000,00
	524111	241.650.000,00	241.650.000,00
JUMLAH		468.405.000,00	468.405.000,00

c. Revisi DIPA ke-2 tanggal 28 Februari 2025 April 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.AEA.001	524111	75.000.000,00	75.000.000,00
1058.AEA.002	524111	25.000.000,00	25.000.000,00
1058.BCA.U02	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521811	21.600.000,00	21.600.000,00
	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00
	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
1058.BCA.U03	521211	4.200.000,00	4.200.000,00
	521811	4.375.000,00	4.375.000,00
	521114	350.000,00	350.000,00
	521211	14.700.000,00	14.700.000,00
	524113	21.140.000,00	21.140.000,00
	521211	1.750.000,00	1.750.000,00
	521114	3.640.000,00	3.640.000,00
1058.QCA.001	522191	1.000.000,00	1.000.000,00
	524111	241.650.000,00	241.650.000,00
JUMLAH		468.405.000,00	468.405.000,00

d. Revisi DIPA ke-3 tanggal 21 Maret 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.AEA.001	524111	75.000.000,00	75.000.000,00
1058.AEA.002	524111	25.000.000,00	25.000.000,00
1058.BCA.U02	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521811	21.600.000,00	21.600.000,00
	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00
	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
1058.BCA.U03	521211	4.200.000,00	4.200.000,00
	521811	4.375.000,00	4.375.000,00
	521114	350.000,00	350.000,00
	521211	14.700.000,00	14.700.000,00
	524113	21.140.000,00	21.140.000,00
	521211	1.750.000,00	1.750.000,00
	521114	3.640.000,00	3.640.000,00
1058.QCA.001	522191	1.000.000,00	1.000.000,00
	524111	241.650.000,00	241.650.000,00
JUMLAH		468.405.000,00	468.405.000,00

e. Revisi DIPA ke-4 tanggal 23 April 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.AEA.001	524111	75.000.000,00	75.000.000,00
1058.AEA.002	524111	25.000.000,00	25.000.000,00
1058.BCA.U02	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521811	21.600.000,00	21.600.000,00
	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00

	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
1058.BCA.U03	521211	4.200.000,00	1.400.000,00
	521811	4.375.000,00	4.375.000,00
	521114	350.000,00	350.000,00
	521211	14.700.000,00	14.700.000,00
	524113	21.140.000,00	21.140.000,00
	521211	1.750.000,00	1.400.000,00
	521114	3.640.000,00	6.790.000,00
1058.QCA.001	522191	1.000.000,00	1.000.000,00
	524111	241.650.000,00	241.650.000,00
JUMLAH		468.405.000,00	468.405.000,00

f. Revisi DIPA ke-5 tanggal 15 Juli 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1058.AEA.001	524111	75.000.000,00	75.000.000,00
1058.AEA.002	524111	25.000.000,00	25.000.000,00
1058.BCA.U02	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521811	21.600.000,00	21.600.000,00
	521211	16.200.000,00	16.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00
	521114	3.600.000,00	3.600.000,00
1058.BCA.U03	521211	4.200.000,00	1.400.000,00
	521811	4.375.000,00	4.375.000,00
	521114	350.000,00	350.000,00
	521211	14.700.000,00	14.700.000,00
	524113	21.140.000,00	21.140.000,00
	521211	1.750.000,00	1.400.000,00
	521114	3.640.000,00	6.790.000,00
1058.QCA.001	522191	1.000.000,00	1.000.000,00
	524111	241.650.000,00	241.650.000,00
JUMLAH		468.405.000,00	468.405.000,00

(3) Tidak terdapat penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus dan Jurnal Manual pada SAKTI Semester I Tahun 2025.

(4) Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Nomor 67/SEK.PMT.W3-Mil/KU1.1.1/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Djati Santoso, S.H.,M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dwi Puspitarini, S.E.
Pejabat Penandatangan SPM	: Nanang Candra T, S.H.
Bendahara Pengeluaran	: Fajar Eka Pratomo, S.E.
Staf Pengelola Keuangan	: Angga Permana Putra A.Md, S.H. Afni Syafaatun, S.A.P
Pengurus/Penyimpan BMN	: Muhammad Arig Al Hafids.

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
SEMESTER I TAHUN 2025

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D. 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2024
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
TOTAL					

LAMPIRAN A.3

HIBAH

PER 30 Juni 2025

NO	NAMA PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	BELUM DISAHKAN	
						NILAI	KETERANGAN
			NIHIL				

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Tgl Data : 31/07/25 7:20 AM

Tgl Cetak : 31/07/25 1:37 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	7,500,200	11,266,100	(3,765,900)	(33.427)
Beban Barang dan Jasa	21,250,500	20,671,900	578,600	2.799
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	54,118,460	157,829,110	(103,710,650)	(65.711)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Tgl Data : 31/07/25 7:20 AM

Tgl Cetak : 31/07/25 1:37 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	82,869,160	189,767,110	(106,897,950)	(56.331)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(82,869,160)	(189,767,110)	106,897,950	(56.331)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(82,869,160)	(189,767,110)	106,897,950	(56.331)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(82,869,160)	(189,767,110)	106,897,950	(56.331)

Keterangan :

FINAL



SIDOARJO, 31 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KJASAPENGGUNA ANGGARAN

WATI SANTOSO, S.H., M.H.
NRP 520873

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Tgl Data : 31/07/25 6:30 AM

Tgl Cetak : 31/07/25 1:39 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	(3,813,000)	(3,919,450)	106,450	(2.72)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(82,869,160)	(189,767,110)	106,897,950	(56.33)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	86,682,160	193,686,560	(107,004,400)	(55.25)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,813,000	3,919,450	(106,450)	(2.72)
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
JAWA TIMUR
JADI SANTOSO, S.H., M.H.
NRP 520873
KUDARJO, 31 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA 663301

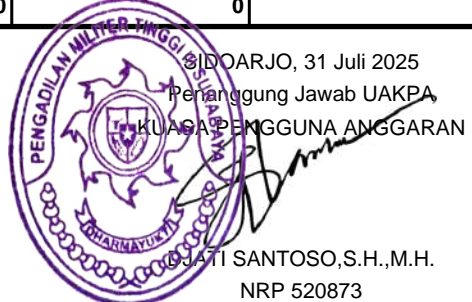
Tgl Data : 31/07/25 7:20 AM
 Tgl Cetak : 31/07/25 1:39 PM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	468,405,000	86,682,160	(381,722,840)	18.51	409,430,000	193,686,560	(215,743,440)	47.31
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SIDOARJO, 31 Juli 2025
 Peranggung Jawab UAKPA,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DJATI SANTOSO, S.H., M.H.
 NRP 520873

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



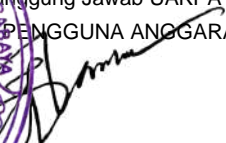
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA 663301

Tgl Data : 31/07/25 7:20 AM
 Tgl Cetak : 31/07/25 1:40 PM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	468,405,000	86,682,160	(381,722,840)	18.51	409,430,000	193,686,560	(215,743,440)	47.31
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SIDOARJO, 31 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 DSA T SANTOSO, S.H., M.H.
 NRP 520873



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Tgl Data : 31/07/25 7:20 AM

Tgl Cetak : 31/07/25 1:40 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	0	5,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	5,000,000	0	5,000,000	
JUMLAH ASET	5,000,000	0	5,000,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	3,813,000	(3,813,000)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	5,000,000	0	5,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,000,000	3,813,000	1,187,000	31.13
JUMLAH KEWAJIBAN	5,000,000	3,813,000	1,187,000	31.13
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	(3,813,000)	3,813,000	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	(3,813,000)	3,813,000	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	(3,813,000)	3,813,000	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,000,000	0	5,000,000	

Keterangan :

FINAL



SIDODARJO, 31 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JATI SANTOSO, S.H., M.H.

NRP 520873

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Tgl Data : 31/07/25 7:20 AM

Tgl Cetak : 31/07/25 1:40 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	5,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	86,682,160
0.0	391111	Ekuitas	3,813,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,240,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,810,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	200,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	54,118,460	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,500,200	0
JUMLAH			91,682,160	91,682,160

Keterangan :

FINAL



SIDOPARJO, 31 Juli 2025

Peranggung Jawab UAKPA

JASA BERTANGGUNG ANGGARAN

DIJAFI SANTOSO,S.H.,M.H.

NRP 520873

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Tgl Data : 31/07/25 12:29 PM

Tgl Cetak : 31/07/25 2:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	86,682,160
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,053,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,810,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,500,200	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	200,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56,570,000	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,451,540
JUMLAH			89,133,700	89,133,700

Keterangan :

FINAL

SIDOARJO, 31 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KJAS PENGGUNA ANGGARAN

 D. J. SANTOSO, S.H., M.H.
 520873



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 05 **Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**
WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 663301 **PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 31/07/25 2:36 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 31/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,590,000	28,740,000	21,053,500	0	21,053,500	73.26	7,686,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	25,590,000	28,740,000	21,053,500	0	21,053,500	73.26	7,686,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	53,050,000	49,900,000	3,810,000	0	3,810,000	7.64	46,090,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	53,050,000	49,900,000	3,810,000	0	3,810,000	7.64	46,090,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,975,000	25,975,000	7,500,200	0	7,500,200	28.87	18,474,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	25,975,000	25,975,000	7,500,200	0	7,500,200	28.87	18,474,800
5221	Belanja Jasa							
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,000,000	1,000,000	200,000	0	200,000	20	800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,000,000	1,000,000	200,000	0	200,000	20	800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	341,650,000	341,650,000	56,570,000	2,451,540	54,118,460	15.84	287,531,540
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,140,000	21,140,000	0	0	0	0	21,140,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	362,790,000	362,790,000	56,570,000	2,451,540	54,118,460	14.92	308,671,540
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	468,405,000	468,405,000	89,133,700	2,451,540	86,682,160	18.51	381,722,840
	JUMLAH BELANJA	468,405,000	468,405,000	89,133,700	2,451,540	86,682,160	18.51	381,722,840

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 05 **Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**
WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 663301 **PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 31/07/25 2:35 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 31/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,590,000	28,740,000	21,053,500	0	21,053,500	73.26	7,686,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	25,590,000	28,740,000	21,053,500	0	21,053,500	73.26	7,686,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	53,050,000	49,900,000	3,810,000	0	3,810,000	7.64	46,090,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	53,050,000	49,900,000	3,810,000	0	3,810,000	7.64	46,090,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,975,000	25,975,000	7,500,200	0	7,500,200	28.87	18,474,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	25,975,000	25,975,000	7,500,200	0	7,500,200	28.87	18,474,800
5221	Belanja Jasa							
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,000,000	1,000,000	200,000	0	200,000	20	800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,000,000	1,000,000	200,000	0	200,000	20	800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	341,650,000	341,650,000	56,570,000	2,451,540	54,118,460	15.84	287,531,540
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,140,000	21,140,000	0	0	0	0	21,140,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	362,790,000	362,790,000	56,570,000	2,451,540	54,118,460	14.92	308,671,540
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	468,405,000	468,405,000	89,133,700	2,451,540	86,682,160	18.51	381,722,840
	JUMLAH BELANJA	468,405,000	468,405,000	89,133,700	2,451,540	86,682,160	18.51	381,722,840



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 663301
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	468,405,000	468,405,000	0
2	Belanja	89,133,700	89,133,700	0
3	Pengembalian Belanja	-2,451,540	-2,451,540	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	5,000,000	5,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	5,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-JUL-25



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TAHUN 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (663301) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
 Kode dan Nama UAPPAPW : (0500) Jawa Timur
 Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Dirjen Badilmiltun MARI
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)			
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal			Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak

12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		V	Ya

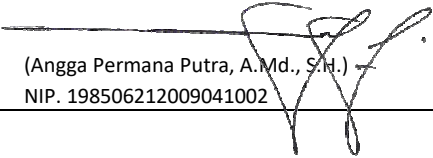
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	V		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak

7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya


LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,


(Angga Permana Putra, A.Md., S.H.)
NIP. 198506212009041002

Sidoarjo , 23 Juli 2025
Penelaah,


(TB Maulana Arief Darma, S.H., M.H.)
NIP. 197605272006041003